

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS YURIDIS ATAS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI PUBLIK

Mohammad Rifa'i

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
masfairif@gmail.com

Samsul Arifin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
samsularifin11112@gmail.com

Abstract

The application of good governance principles is a fundamental element in the implementation of democratic and law-based governance. In the context of state administrative law, the principles of accountability, transparency, and public participation serve as instruments for controlling administrative authority and protecting citizens' rights. This study aims to analyse the application of these good governance principles within the framework of state administrative law in Indonesia through a juridical approach. The research method used is qualitative research in the form of library research, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal doctrines, and Scopus-indexed scientific journal articles. Data analysis is carried out in a legal-normative manner using a conceptual and legislative approach. The results of the study show that although the principles of accountability, transparency, and public participation have a strong normative basis, their implementation in the practice of governance still faces various obstacles. Accountability tends to be formal, transparency is not yet fully substantive, and public participation is still limited to procedural fulfilment. This study concludes that strengthening the application of good governance principles in state administrative law requires consistency in implementation, increased capacity of the apparatus, and effective oversight mechanisms to realise a democratic, just, and public interest-oriented government.

Keywords: good governance, state administrative law, accountability, transparency, public participation

Abstrak

Penerapan prinsip good governance merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen pengendalian kewenangan administrasi serta perlindungan hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut dalam kerangka hukum administrasi negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus. Analisis data dilakukan secara yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala. Akuntabilitas cenderung bersifat formal, transparansi belum sepenuhnya substantif, dan partisipasi publik masih terbatas pada pemenuhan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara memerlukan konsistensi pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta efektivitas mekanisme pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: good governance, hukum administrasi negara, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik